Peranan Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Khaidir Anwar

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila

Email: khaidir.anwar@fh.unila.ac.id

Abstrak

Menjelaskan peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum merupakan tujuan penulisan yang hendak dicapai. Metode penelitian normatif (*doctrinal research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah dan filosofis dipergunakan untuk menemukan jawaban atas tujuan tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa filsafat ilmu sangat berperan bagi pengembangan ilmu hukum. Dengan perkataan lain, filsafat ilmu sebagai filsafat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam lapisan ilmu hukum, merupakan dasar dan arah bagi pengembangan ilmu hukum.

Kata kunci : *Filsafat Ilmu dan Ilmu hukum*

1. Pendahuluan

Paul Scholten, seorang Guru Besar Hukum Romawi, Ensiklopedia Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, Belanda menyatakan bahwa :

Ihwal dengan kebenaran dalam ilmu sama seperti dengan keadilan dalam hukum. Ilmu mencari kebenaran, hukum mencari keadilan, mereka dua-duanya sama-sama selalu berada dalam perjalanan, sambil berjalan mereka memutuskan tentang apa yang menolong mereka lebih jauh, putusan ilmiah tentang ketepatan, tidak tentang kebenaran, putusan hukum tentang kesesuaian dengan hukum (*keabsahan, rechtmatigheid*), tidak tentang keadilanYang pasti adalah bahwa ilmu hukum memperlihatkan dalam derajat yang tinggi apa yang menjadi ciri khas pemikiran ilmiah, tidak hanya yang dari Aristoteles

atau dari Thomas, melainkan juga yang modern.¹

Dalam mengembangkan suatu ilmu hukum yang adekuat untuk melaksanakan pembinaan hukum dan praksis hukum di masyarakat, maka refleksi kritis terhadap landasan kefilsafatan, sifat keilmuan dan bangunan ilmu hukum, maka secara rational akan dapat diperkirakan sejauh mana yang dapat diharapkan dan apa yang diperlukan serta apa yang harus dijalankan dalam memerankan ilmu hukum pada pembinaan dan praksis hukum.²

Refleksi kritis sistematis terhadap landasan kefilsafatan, sifat

¹ Paul Scholten, "*Struktur Ilmu Hukum*", Penerbit Tak Berkala No. 1, Seri Dasar Dasar Ilmu Hukum, (Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 1997), hlm. 36-37

² Bernard Arief Sidharta, "*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*", (Mandar Maju, Bandung: 1997), hlm. 12

dan ciri-ciri keilmuan serta bangunan (struktur) ilmu hukum itu termasuk kedalam disiplin filsafat ilmu. Menurut Jan Gijssels dan Max van Hoeke, Filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum atau gejala-gejala hukum. Dalam filsafat pertanyaan-pertanyaan paling dalam dibahas dalam hubungan dengan makna, landasan, struktur, dan sejenisnya dalam kenyataan. Dalam filsafat hukum, pertanyaan-pertanyaan difokuskan pada keterberian-keterberian (data) yuridikal.³

Wilayah telaah filsafat hukum itu sendiri dapat dibagi kedalam sejumlah wilayah atau bagian berikut:

1. **Ontologi Hukum** (ajaran hal ada, *zijnleer*) : penelitian tentang "hakikat" dari hukum, tentang "hakikat", misalnya dari demokrasi, tentang hubungan antara hukum dan moral;
2. **Aksiologi Hukum** (ajaran nilai, *waardenleer*) : penentuan isi dan nilai seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, penyalahgunaan hak;
3. **Ideologi Hukum** (harfiah : ajaran idea, *ideenleer*) : pengolahan wawasan menyeluruh atas manusia dan masyarakat yang dapat berfungsi sebagai landasan dan/atau sebagai legitimasi bagi pranata-pranata hukum yang ada atau yang akan datang, sistem-sistem hukum seutuhnya atau bagian-bagian dari sistem tersebut (misalnya

tatanan-tatanan hukum kodrat, filsafat hukum Marxistik);

4. **Epistemologi Hukum** (ajaran pengetahuan, *kennisleer*): penelitian tentang pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang "hakikat" dari hukum atau masalah-masalah filsafat hukum fundamental lainnya mungkin. Jadi, ini adalah suatu bentuk dari meta-filsafat;
5. **Teleologi Hukum** (ajaran finalitas, *finaliteitsleer*) : hal menentukan makna dan tujuan dari hukum;
6. **Ajaran ilmu** (*wetenschapleer*) dari hukum : ini adalah meta-teori dari ilmu hukum, yang di dalamnya diajukan dan dijawab pertanyaan-pertanyaan antara lain dalam hubungan dengan kriteria bagi keilmiahannya (sejauh mana pengetahuan ilmiah tentang hukum itu dimungkinkan?), dan dalam hubungan dengan klasifikasi ilmu hukum (bukan klasifikasi hukumnya itu sendiri). Juga metodologi dari filsafat hukum sendiri (dengan mengecualikan metodologi dari cabang-cabang ilmu hukum lainnya) juga dapat dimaksudkan kedalamnya;
7. **Logika hukum** (*rechtslogika*) : penelitian tentang aturan-aturan berfikir hukum dan argumentasi yuridik, bangunan logikal serta struktur sistem hukum. Logika hukum telah berkembang menjadi sebuah cabang filsafat hukum mandiri dan bahkan menjadi disiplin sendiri dalam ilmu hukum, yang di dalamnya ia mengambil tempat sendiri disamping filsafat hukum.⁴

³ Jan Gijssels dan Mark van Hooke, 2000, "Apakah Teori Hukum Itu?", Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Penerbitan Tidak Berkala No. 3, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 56

⁴ Ibid, hlm. 57

II. Peranan filsafat ilmu

Jika kita kembali kepada permasalahan tentang peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum, maka di bawah ini akan dipaparkan beberapa aliran yang penting dewasa ini, antara lain :

1. Positivisme Logikal

Positivisme Logikal adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh kelompok ilmuwan dan filsuf yang menamakan diri Wiener Kreis. Pada tahun 1922, Moritz Schlick, seorang Sarjana Fisika diangkat menjadi Guru Besar Filsafat kelompok ilmu induktif di Wina. Atas inisiatifnya, pada tahun 1925 terbentuk kelompok diskusi di Wina yang beranggotakan sejumlah ilmuwan dan filsuf yang kemudian dikenal dengan Wiener Kreis. Diantaranya yang terkenal disamping Schlick, adalah : Logikus Rudolf Carnap, matematikus Philip Frank, historikus Victor Kraft, Filsuf Herbert Feigl dan Friedrich Waismann. Kelompok ini secara teratur bertemu dan bertukar pikiran tentang makna ilmu dan kemungkinan peranannya dalam menumbuhkan kehidupan kemasyarakatan yang lebih baik. Berdasarkan kesamaan wawasan kefilsafatan yang ditumbuhkan dalam pertemuan-pertemuan itu, Rudolf Carnap, Matematikus Hans Hanh dan sosiolog Otto Neurath, merumuskan dan menerbitkan sebuah risalah berjudul "Wissenschaftliche Weltauffassung, Der Wiener Kries".⁵

⁵ Hermann Koningsveld, 1987, "Het Verschijnsel Wetenschap", Amsterdam, hlm. 30 dan di dalam Arief Sidharta, Op. Cit, hlm. 85

Aliran ini berkeyakinan bahwa hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah, dan bahwa pengetahuan ilmiah itu harus bersifat empiris. Artinya, hanya kenyataan yang dapat diobservasi panca-inderanya yang dapat menjadi obyek ilmu. Pengetahuan tentang hal lainnya tidak obyektif, dan karena itu tidak dapat diuji kepastian kebenarannya. Sebagai sarana penguji kebenaran pengetahuan ilmiah, mereka mengajukan asas **verifikasi**. Berdasarkan asas ini, putusan ilmiah adalah benar hanya jika putusan itu dapat diverifikasi secara empiris, yakni dapat diuji pada kenyataan yang dapat diobservasi. Metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah adalah metode empirik yang pada intinya adalah induksi. Produknya yang berupa teori ilmiah sekaligus juga merupakan hipotesis yang dapat diuji kembali dengan kenyataan. Aliran ini tentang kebenaran, menganut Teori Korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara putusan atau proposisi dan dunia kenyataan. Jadi putusan atau teori ilmiah adalah benar jika mencerminkan dunia kenyataan.⁶

2. Rasionalisme Kritis

Tokoh terpenting dalam aliran Rasionalisme Kritis adalah Karl Raimund Popper. Bukunya yang terkenal adalah "The Logig Of Scientific Discovery" yang terbit pada tahun 1959 dan merupakan terjemahan dari "Logig Der

⁶ Bandingkan juga dengan , J.J.H. Bruggink, "Refleksi Tentang Hukum", Diterjemahkan oleh Arief Sidharta, OP.Cit, hlm. 190-194

Forchung” yang terbit pada tahun 1934.⁷

Menurut aliran ini, pengetahuan ilmiah harus obyektif dan teoritikal, dan pada analisis terakhir merupakan penggambaran dunia yang dapat diobservasi. Seperti halnya aliran positivisme logikal, aliran ini menganut Teori Kebenaran-Korespondensi. Namun bagi aliran ini putusan ilmiah yang sesuai dengan kenyataan yang teramati hanya menghasilkan pengetahuan yang mungkin benar (*probabel*), dan karena itu hanya dipandang benar sampai dibuktikan sebaliknya. Aliran ini menolak metode induksi sebagai metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan, karena kesimpulan yang dihasilkan induksi pada dasarnya bertumpu pada premis-premis partikular, sehingga kesimpulannya lebih luas daripada premis-premis yang mendukungnya. Aliran ini berpendapat metode ilmiah yang tepat adalah deduksi, yakni berdasarkan dalil umum menarik kesimpulan berupa putusan khusus (proposisi partikular). Hipotesis ini berfungsi seperti lampu pencari (*searchlight*) yang disorotkan pada fakta yang dapat diobservasi.

Aliran rasionalisme kritis tersebut mengajukan **asas falsifikasi** sebagai kriteria penguji untuk mengontrol putusan-putusan ilmiah. Selama belum terfalsifikasi, artinya selama belum ditemukan fakta yang menyangkal hipotesis yang bersangkutan, maka pengetahuan yang dihasilkan harus dipandang sebagai benar untuk sementara. Dalam pandangan aliran ini putusan ilmiah itu selalu berkenaan dengan gejala alam.

⁷ Bernard Arief Sidharta, Op.Cit, hlm. 86-88. Lihat juga J.J.H. Bruggink, OP.Cit, hlm. 194-200

Berdasarkan jalan pikiran yang dikemukakan di atas, maka menurut aliran Rasionalisme Kritis putusan ilmiah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Putusan ilmiah harus dapat diuji secara kritis;
2. Teori ilmiah harus tersusun secara logis konsisten;
3. Putusan (proposisi) ilmiah harus sebanyak mungkin dapat difalsifikasi, artinya rumusannya secara prinsip harus memungkinkan untuk difalsifikasi. Jika putusan ilmiah itu mampu bertahan terhadap usaha-usaha falsifikasi, maka dapat dikatakan bahwa telah terbentuk putusan ilmiah obyektif yang benar untuk sementara waktu.

3. Teori Paradigma Thomas Kuhn

Thomas Kuhn adalah seorang sejarawan dan sosiolog hukum. Karya utamanya adalah “The Structure Of Scientific Revolutions” yang terbit tahun 1970 dilengkapi dengan Postscript yang memuat modifikasi pandangannya serta tanggapan terhadap kritik. Dalam bukunya tersebut Kuhn mengemukakan pandangan tentang ilmu yang berputar sekitar lima istilah atau konsep kunci yakni, paradigma, revolusi ilmiah, pra-paradigmatik, ilmu normal dan anomali. Berbeda dengan Propper yang mendekati pengertian ilmu secara internal, Kuhn mendekati ilmu secara eksternal sebagai penulis sejarah dan sosiolog.⁸

Dengan penggunaan istilah paradigma ini, Kuhn hendak menunjuk pada sejumlah contoh praktek ilmiah aktual yang diterima

⁸ Bernard Arief Sidharta, Op.Cit, hlm. 89-90

atau diakui dalam lingkungan komunitas ilmiah, menyajikan model-model yang berdasarkan lahir tradisi penelitian ilmiah yang terpadu (*koheren*). Contoh praktek ilmiah itu mencakup dalil, teori, penerapan dan instrumentasi. Dengan demikian para ilmuwan yang penelitiannya didasarkan pada paradigma yang sama pada dasarnya terikat pada aturan dan standar yang sama dalam mengembangkan ilmunya. Keterikatan pada aturan dan standar ini adalah prasyarat bagi adanya ilmu normal. Dengan demikian yang dimaksud dengan paradigma ini adalah cara pandang atau kerangka berfikir yang berdasarkan fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami.

Perubahan paradigma itu akan menimbulkan berbagai perubahan dalam kegiatan ilmiah. Hal itu akan menimbulkan redefinisi ilmu yang bersangkutan. Beberapa masalah dinyatakan sebagai masalah yang termasuk dalam disiplin lain atau dinyatakan bukan masalah ilmiah lagi. Yang tadinya dianggap bukan masalah atau hanya masalah kecil, kini menjadi masalah pokok. Standar dan kriteria untuk menentukan keabsahan masalah dan keabsahan solusi masalah dengan sendirinya juga berubah. Secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan paradigma itu akan membawa transformasi dalam *"the scientific imagination"*, dan dengan itu juga terjadi *"transformation of the word"*.

4. Hermeneutik

Semua ajaran mengenai ilmu yang dikemukakan di atas mengacu pada ilmu alam sebagai modelnya. Hanya dengan analogi dan berbagai adaptasi saja ajaran-ajaran ilmu itu dapat diaplikasikan pada ilmu-ilmu manusia. Misalnya, Hans Albert

dalam bukunya *"Erkenntnis Und Recht"* dan A.H. de Wild dalam bukunya *"De Rationaliteit Van Het Rechterlijk Oordeel"*, mencoba menerapkan teori Propper dalam bidang hukum. Berbeda dengan aliran-aliran itu, aliran Hermeneutik secara khusus memberikan perhatian atau lebih terkait pada ilmu-ilmu manusia.

Perkataan Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata kerja *"hermeneuein"* yang berarti *"menafsirkan"* atau *"menginterpretasi"* dan kata benda *"hermeneia"* yang berarti *"penafsiran"* atau *"interpretasi"*.⁹

Pada awal mulanya hermeneutik dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan dalam upaya memahami naskah (teks) kuno. Melalui karya Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, mengembangkan dan menggunakan hermeneutik sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Akhirnya lewat karya Hegel dan karya Heidegger, Hans George Gadamer, mengembangkan hermeneutik sebagai landasan kefilsafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *"Wahrheit Und Methode"* yang terbit pada tahun 1960. Dalam bukunya tersebut Gadamer menyisihkan paragraf khusus yang memaparkan ilmu hukum dogmatik atau hermeneutika yuridis sebagai salah satu eksemplar cara kerja hermeneutik, yakni dalam sebuah paragraf dengan judul *"The Exemplary Significance Of Legal Hermeneutics (Die Exemplarische Bedeutung Der Juristischen Hermeneutik)"*.

Filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang hal mengerti atau

⁹ E. Sumaryono, Op.Cit, hlm. 23

memahami (*Verstehen*). Yang dipermasalahkan dalam filsafat ini bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi. Sebagai filsafat tentang hal memahami, filsafat hermeneutik berkenaan dengan semua hal yang memiliki makna sejauh hal tersebut dapat diungkapkan dalam bahasa dan dapat dimengerti. Obyek refleksinya mencakup bahasa manusia, bahasa alam, bahasa seni, dan bahasa hal-hal pada umumnya. Dengan demikian pemahaman dalam hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan intensional, melainkan juga mencakup hal-hal yang tidak dimaksud atau diinginkan oleh siapapun, mencakup tujuan manifes dan tujuan laten. Diproyeksikan pada konsep ilmu menurut Arief Sidharta, filsafat hermeneutik memunculkan butir-butir seperti yang dikemukakan oleh Bruggink dalam bukunya "Rechtsreflecties" sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan tematik dalam kelompok manusia, maka para ilmuwannya dalam menjalankan karya ilmiahnya tidak mungkin menempatkan diri sebagai pengamat belaka terhadap kenyataan. Dalam berbagai bidang ilmu manusia (seni, teologi, antropologi, sosiologi, hukum) menuntut para ilmuwan untuk membangun teori ilmiahnya sebagai partisipan pada gejala yang dipelajarinya;
2. Relasi inti dalam kelompok ilmu manusia bukanlah relasi subyek-obyek melainkan relasi subyek-subyek;
3. Karena orang hanya dapat mengemban ilmu dengan bertolak dari dan dalam kerangka

tradisi ilmu, maka para ilmuwan tidak mungkin tanpa prasangka pada waktu memulai melaksanakan penelitian dan karya ilmiah;

4. Dalam kenyataan penelitian dijalankan oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok individual masing-masing dengan pengalaman dan gagasan-gagasan sendiri;
5. Baik dalam kelompok ilmu manusia maupun dalam kelompok ilmu alam, konsensus dalam lingkungan para ilmuwan dipandang penting dalam pengembangan ilmu.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa posisi filsafat ilmu sangat menentukan dalam perkembangan ilmu hukum. Karena ilmu hukum dapat didekati melalui metode induksi dan deduksi. Dengan meminjam dalil-dalil, konsep-konsep, batasan-batasan yang diajukan oleh filsafat ilmu dengan berbagai alirannya dapat diharapkan perkembangan yang sangat pesat untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Melalui metode induksi, sebagaimana dianut oleh aliran Positivisme Logikal, ilmu hukum dilihat, dijabarkan, dianalisis dalam hubungannya dalam kenyataan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain melalui metode induksi ini, ilmu hukum dilihat dari segi efektivitasnya atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam lingkup hukum terkenal dengan istilah "*Law is a tool of social*

¹⁰ Bernard Arief Sidharta, Op.Cit, hlm. 101-103

engeneering (hukum sebagai sarana perubahan sosial)".¹¹

Selo Soemardjan, menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup bermacam perubahan di dalam lembaga masyarakat sehingga mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap, pola perilaku serta hubungan antar kelompoknya.¹² Mayor Polak sendiri menyatakan, perubahan sosial dimaksudkan sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yaitu perubahan yang bersifat struktural.¹³ Soerjono Soekanto membedakan beberapa tipe perubahan sosial yang meliputi : (1) Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat, (2) Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar, (3) Perubahan yang dikehendaki (*intended change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) dengan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*) atau perubahan yang tak direncanakan (*unplanned change*).¹⁴

Kemudian melalui metode deduksi dengan meminjam konsep-konsep, ajaran-ajaran, dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Aliran Rasionalisme Kritis, maka ilmu hukum dapat berkembang. Dalam kepustakaan ilmu hukum, masalah deduksi antara lain berbicara masalah *law is a tool of social*

control (hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial). Dalam hal ini hukum sebagai penjaga ketertiban dan pemelihara status quo. Hukum hanya dimaksudkan untuk mempertahankan pola hubungan serta kaidah-kaidah yang telah berlaku sebelumnya. Hukum dan ketertiban dapat diibaratkan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama, masing-masing dapat dibedakan namun sulit untuk dipisahkan. Seperti dinyatakan oleh Kusumadi Pudjosoewojo bahwa tugas terpokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban itu sendiri merupakan syarat pokok adanya keteraturan dalam masyarakat.¹⁵

Dalam hubungannya dengan dua fungsi hukum tersebut di atas, maka seakan-akan ada kontradiksi yaitu disatu sisi hukum sebagai sarana perubahan sosial, di sisi yang lain hukum sebagai sarana pengontrol masyarakat. Kontradiksi ini hanya nampak dalam tataran pemikiran, sedangkan dalam tataran praktikal keduanya justru saling melengkapi satu sama lain dan keduanya menjadi kebutuhan inheren dalam pelaksanaan pembangunan.

Disisi lain dalam khasanah ilmu hukum berkembang dengan apa yang dinamakan pendekatan hukum emperis dan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum emperis ini, dilihat, dipaparkan, dijelaskan dan dianalisis tentang gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat atau fenomena kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Wacana ini bisa dikatakan dilakukan secara induksi. Sedangkan pendekatan hukum normatif seperti

¹¹ Kusumadi Pudjosoewojo, 1971, "*Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*", Aksara, Jakarta, hlm. 11

¹² Selo Soemardjan, 1981, "*Social Change in Yogyakarta*", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 3

¹³ Mayor Polak, 1966, "*Sosiologi Pengantar Ringkas*", Ikhtiar, Jakarta, hlm. 406

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1970, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Yayasan Penerbit UI, Jakarta, hlm. 243-245

¹⁵ Kusumadi Pudjosoewojo, Loc.Cit, hlm. 12

diuraikan di atas merupakan pendekatan khas hukum yang sarat dengan nilai, norma, kaidah. Wacana ini bisa dikatakan dilakukan secara deduksi.

III. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa filsafat ilmu sangat berperan bagi pengembangan ilmu hukum. Dengan perkataan lain, filsafat ilmu sebagai filsafat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam lapisan ilmu hukum, merupakan dasar dan arah bagi pengembangan ilmu hukum.

Daftar Pustaka

- Paul Scholten, 1997, *"Struktur Ilmu Hukum"*, Penerbit Tak Berkala No. 1, Seri Dasar Dasar Ilmu Hukum, Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 1997, *"Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional"*, Mandar Maju, Bandung.
- Jan Gijssels dan Mark van Hooeke, 2000, *"Apakah Teori Hukum Itu?"*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Penerbitan Tidak Berkala No. 3, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- J.J.H. Bruggink, 1996, *"Refleksi Tentang Hukum"*, Diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya, bandung.
- Kusumadi Pudjosoewojo, 1971, *"Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia"*, Aksara, Jakarta.
- Selo Soemardjan, 1981, *"Social Change in Yogyakarta"*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mayor Polak, 1966, *"Sosiologi Pengantar Ringkas"*, Ikhtiar, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1970, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.